

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia tidak akan jadi seperti sekarang ini tanpa melalui berbagai macam rintangan yang terjadi selama ini. Misalnya mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, perkembangan pemerintah yang terjadi di Indonesia dimulai pada saat tokoh-tokoh pahlawan melakukan pergerakan nasional yang kemudian membantu proses kemerdekaan atau reformasi pada saat pimpinan presiden pertama kita yaitu Ir. Soekarno. Banyak tahap-tahap yang sudah dilalui oleh pemerintahan Indonesia agar pemerintahan Indonesia dapat menjadi maju seperti sekarang ini. Perkembangan ini ditandai dengan peristiwa reformasi. Reformasi diwarnai dengan tuntutan terhadap hal-hal lain yang mencerminkan nilai-nilai demokratis. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wujudkan melalui pemberian ruang otonomi yang lebih luas dan nyata kepada pemerintah daerah, khususnya pada tingkat provinsi dan kabupaten. Dan nilai-nilai demokratis dapat tercapai melalui terciptanya ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam membangun daerah, memerlukan adanya suatu tatanan pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang mampu menempatkan kepentingan warga negara sebagai sentra kehidupan dari sebuah pemerintahan.

Pemerintahan yang mempunyai tatanan yang baik dapat terbuka bagi para masyarakat terutama tentang keuangan yang di kelola dalam pemerintahan. Pengelolaan keuangan negara atau daerah yang efektif, efisien dan transparan perlu diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan pengendalian dalam pemerintahan tersebut. Jika saja dalam pengolahan keuangan pada pemerintahan memiliki sesuatu keganjalan perlu di periksa lebih lanjut. Misalnya dalam pendapatan kas yang di terima daerah terdiri dari pajak, hasil restribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan lain-lain daerah yang harus diperiksa lebih teliti oleh pemerintahan agar kita dapat mengetahui apakah sudah sesuai dengan sistem akuntansi.

Pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah untuk memperkecil potensi adanya kecurangan yang terjadi didalam sebuah pemerintahan. Banyaknya pemerintahan daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan. Dalam berbagai hal karyawan maupun pemimipin suatu lembaga pemerintahan mempunyai keterbatasan dalam melakukan sebuah kesalahan sehingga sangat dibutuhkannya sebuah sistem pengendalian. Kecurangan yang terjadi dalam organisasi maupun lembaga pemerintahan di sebabkan oleh lemahnya pengendalian interen.

Melalui penerimaan kas pendapatan asli daerah atau yang biasa di singkat dengan PAD kita dapat mengetahui bagaimana sistem yang ada

dalam Badan atau lembaga-lembaga pemerintahan tersebut, dengan melalui ini kita juga dapat melihat apakah tidak atukah terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan-laporan akuntansi yang ada pada lembaga pemerintahan. Menurut Azmi Hanift, dkk (2014) pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pada Badan Keuangan Manggarai ini adalah instansi yang berada dibawah pemerintah Kabupaten Manggarai Tengah ini memiliki tugas dan tanggungjawab dalam tugas pemungutan dan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi utama dari Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Tengah ini diperlukannya sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah yang baik dalam proses pengelolaan keupngan daerah di pemerintah Kabupaten Manggarai. Dalam Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana primbangan dan lain-lain yang sah.

Didalam era otonomi daerah, Pendaptan Asli Daerah memegang peranan utama dalam sistem akuntansi penerimaan kas, karena selain memiliki jumlah dan transaksi yang banyak, Pendapatan Asli Daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan yang ada di wilayah sendiri. Dapat dikatakan, bahwa sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) mencerminkan sebagian besar aktivitas pemerintahan Kabupaten Manggarai Tengah dalam pengelolaan pendapatan atau penerimaan daerah. Kenyataan tersebut tidak menutupi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun kecurangan dalam proses penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dikarenakan hal tersebut perlu diadakannya pengendalian interen pada Badan BKD agar kita dapat mengetahui sistem akuntansi yang ada pada Badan tidak mengalami kecurangan atau penyelewengan tugas.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tengah dengan judul **“Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Alat Pengendalian Interen”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana analisis sistem informasi akuntansi penerimaan kas pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian interen pada Badan Keuangan Daerah Manggarai?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penerimaan kas pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian interen pada Badan Keuangan Daerah Manggarai

D. Manfaat

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan terutama berkaitan dengan sistem akuntansi penerimaan kas pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian interen.

2. Bagi Badan Keuangan

Dapat berguna bagi instansi dan dapat melaksanakan pengendalian interen agar tidak terjadi kecurangan dalam mengelola keuangan ataupun hal lainnya.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemikiran akademis dalam pengembangan Ilmu Ekonomi Akuntansi, khususnya sistem akuntansi penerimaan kas pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian interen dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah.

